

**ANALISIS PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AZURA PUTRI

NIM. 210802125

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Azura Putri
NIM : 210802125
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 22 Agustus 2002
Alamat : Pante Aree, Delima

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2025


Azura Putri

NIM.210802125

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

AZURA PUTRI

NIM. 210802125

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

A R - Pembimbing Y



Siti Nur Zalikha, M.Si.

NIP. 199002282018032001

**LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
ANALISIS PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN PIDIE**

ACEH

SKRIPSI

**Azura Putri
NIM 210802125**

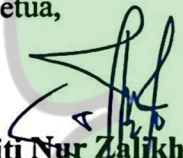
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Soisal Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 5 Agustus 2025

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Siti Nur Zalikha, M.SI.
NIP. 199002282018032001

Sekretaris,


Habibul Abrar.B.Sc.,M.P.P
NIP. 199407072025051005

Penguji I,

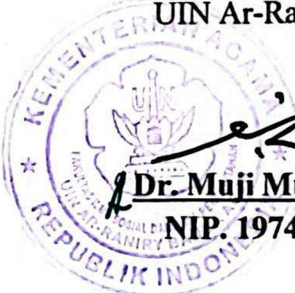

Dr. Delfi Suganda, S.H. I.,LL.M
NIP. 198611122015031005

Penguji II,


Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP. 197911172023212012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740371999031005

ABSTRAK

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik mendorong pemerintah untuk menghadirkan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Identitas Kependudukan Digital. Program ini dirancang sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) fisik dengan identitas digital yang dapat diakses melalui aplikasi pada perangkat seluler. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan program IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan belum berjalan optimal. Sejumlah kendala yang ditemukan antara lain terbatasnya literasi digital, keterbatasan perangkat dan jaringan internet, serta belum adanya penerimaan penuh dari instansi pelayanan terhadap penggunaan IKD. Evaluasi terhadap program juga belum berjalan secara berkelanjutan, Maka diperlukan strategi yang lebih adaptif dan terarah untuk mempercepat implementasi IKD di Kabupaten Pidie.

Kata Kunci: *Strategi, Identitas Kependudukan Digital, Administrasi Kependudukan, Transformasi Digital*



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie”** dengan baik dan waktu yang tepat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh nilai mata kuliah skripsi. Selama melakukan penyusunan skripsi penulis banyak menerima atas segala arahan, bimbingan serta dukungan dan motivasi yang telah diberikan. Penulis hanya mampu memanjatkan doa semoga usaha dan bantuan mereka mendapatkan balasan kebaikan di sisi-Nya, baik dalam bentuk moral maupun material. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, S. Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M. Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai dosen Pembimbing skripsi yang memberikan masukan luar biasa dan tempat berdiskusi dengan penuh kesabaran. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan, ilmu, dan

keikhlasan beliau dengan pahala yang berlipat ganda, kesehatan, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupannya.

7. Segenap seluruh dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
8. Terima Kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, yang sudah sedia menjadi informan dalam penelitian ini sehingga terselesainya penelitian skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan saya Ilmu Administrasi Negara 2021 yang telah membantu penulis tetap fokus dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teruntuk kedua orang tua saya Ayahanda Bukhari dan Ibunda Saudah. Terima kasih atas do'a, cinta, kepercayaan dan segala pengorbanan tulus kasih sayang yang tiada henti diberikan kepada penulis. Sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil. Terima kasih sudah menemani berproses dan selalu membuat penulis bangkit agar menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik terus kedepannya. Semoga Allah SWT membalas segala cinta, lelah, dan pengorbanan yang telah ayah dan ibu berikan dengan balasan surga tertinggi.
11. Untuk adik-adikku tersayang, M. Al Hafiz dan Muzammil, terima kasih karena selalu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan di tengah lelahnya perjalanan ini. Tawa tulus, canda sederhana, serta perhatian kecil kalian selalu berhasil menghadirkan senyum, bahkan di masa-masa tersulit. Kehadiran kalian telah menjadi kekuatan besar yang mendorongku untuk terus menyelesaikan langkah ini. Semoga di masa depan kalian mampu meraih cita-cita yang lebih tinggi dan gemilang. Kakak akan selalu merasa bangga kepada kalian.
12. Terakhir kepada diri sendiri yang telah bertahan hingga saat ini, di saat tidak percaya terhadap diri sendiri namun tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan. Terimakasih sudah memilih berusaha sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi

manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba dan memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun. Apapun kekurangan dan kelebihanmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan pembelajaran serta perbaikan di masa mendatang, agar karya ini dapat lebih bermanfaat dan memberikan nilai positif bagi para pembaca.

Banda Aceh 7 Juli 2025

Azura Putri

NIM. 210802125



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABLE	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Strategi.....	11
2.1.2 Konsep Identitas Digital.....	14
2.1.3 Konsep E-Government.....	16
2.1.4 Konsep Inovasi Pelayanan Publik.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3 Sumber dan Bentuk Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Analisis Data.....	27

3.6 Teknik Uji Keabsahan Data	29
3.7 Teknik Uji Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie	34
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie	35
4.1.3 Tugas pokok dan Fungsi.....	36
4.1.3 Struktur Organisasi.....	43
4.2 Hasil Penelitian	43
4.2.1 Analisis Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Pidie	43
4.3 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie	70
4.4 Pembahasan Penelitian.....	76
4.4.1 Hambatan Rendahnya Tingkat Penggunaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Pidie.....	76
4.4.2 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dalam mendukung pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital	78
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABLE

Table 3.1 Dimensi dan Indikator strategi serta hambatan.....	26
Table 3.2 Informan Penelitian.....	28
Table 4.1 Agregat wilayah aktivasi Identitas Kependudukan Digital 23 Kecamatan Kabupaten Pidie 2025	66
Table 4.2 Jumlah penduduk warga Kabupaten Pidie 2025	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laporan layanan Dinas Dukcapil Kabupaten Pidie.....	7
Gambar 4.1.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie ...	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.....	43
Gambar 4.2.1 Kegiatan Sosialisasi Aktivasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Pidie.....	51
Gambar 4.2.2 Spanduk alur pelayanan IKD di kantor Disdukcapil Kabupaten Pidie.....	54
Gambar 4.2.3 Sosialisasi dan aktivasi IKD di Universitas Jabal Ghafur.....	52
Gambar 4.2.4 Tampilan aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada menu beranda dan dokumen.....	63
Gambar 4.3.1 Sosialisasi dan aktivasi IKD pada Dinas Perumahan dan Kemukiman, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Rumah Sakit Tgk Chik Ditiro, dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie.....	71
Gambar 4.3.2 Sosialisasi dan aktivasi IKD pada SMA 1 Glumpang Tiga, SMA 1 Mutiara, MAN 3 Padang Tiji, SMA 1 Bakti Kabupaten Pidie.....	72
Gambar 4.3.3 Pelaksanaan perekaman KTP-el dan pengaktifan IKD pada Kecamatan Batee, Kecamatan Kembang Tanjong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kecamatan Indrajaaya.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara

Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 3 Surat penelitian

Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian

Lampiran 5 Dokumentasi penelitian

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi mendorong organisasi sektor publik untuk terintegrasi dalam berbagai aspek pelayanan dan tata kelola, termasuk administrasi kependudukan. Tujuannya adalah agar lebih efisien, bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga segala sektor dalam kehidupan mulai tersentuh transformasi digital baik di sektor publik maupun sektor privat.¹ Pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu pokok yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia mempunyai identitas kewarganegaraan yang sah. Administrasi kependudukan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Data kependudukan yang akurat dan terkini sangat diperlukan untuk perencanaan, pembangunan, pengambilan keputusan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.²

Era digital saat ini, paradigma dalam pelayanan publik telah mengalami perubahan secara global untuk beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Program Identitas Kependudukan

¹ Kurnia Rheza Randy Adinegoro, "Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanian : Hak Tanggungan Elektronik Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang," *Jurnal Administrasi Publik* 19, no. 1 (2023): 26–49, <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.135>.

² Maulana Habib Hasyim, Hanny Purnamasari, and Evi Priyanti, "Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu," *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8, no. 2 (2021): 365–70, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/5602>.

Digital yang bertujuan untuk merampingkan proses administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.³

Identitas kependudukan digital merupakan representasi digital dari identitas penduduk yang tersimpan dalam aplikasi ponsel, bertujuan untuk menggantikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik fisik secara bertahap. Perubahan ini yang terjadi dari peralihan secara manual atau konvensional ke sistem digital.⁴ Identitas Kependudukan Digital salah satu Program yang sudah dijalankan sejak pertengahan tahun 2022. Namun hampir secara keseluruhan daerah masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Pidie telah menerapkan E-Government sebagai inovasi baru dalam aktivasi KTP Digital melalui aplikasi IKD.

E-Government merupakan konsep menarik yang mulai dikenal dalam dunia administrasi publik pada akhir dekade 1990-an. Kehadirannya dianggap penting untuk mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan utama membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah, serta literasi digital yang membantu masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga

³Kementerian Dalam Negeri, R. (2022). Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Direktur Jenderal Peraturan perundang-undang Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 37

⁴Danuri, M., Informatika, M., Teknologi, J., & Semarang, C. *perkembangan dan transformasi teknologi digital*.

pengguna yang cerdas dan kritis dalam memanfaatkan layanan publik digital.⁵ Dalam pelayanan publik digital seperti program IKD, literasi digital menjadi landasan penting agar masyarakat dapat memahami cara kerja aplikasi IKD, menghindari hoaks, dan menjaga privasi data kependudukan mereka.⁶

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan dimulai sejak diterbitkannya instruksi presiden No. 6 Tahun 2001 tentang telematika, yang pentingnya penggunaan informasi teknologi oleh aparatur negara guna mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan mendorong proses demokrasi. Kemudian kebijakan ini diperkuat oleh instruksi presiden No. 3 Tahun 2003 tentang strategi dan kebijakan nasional pengembangan E-Government, yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, serta meningkatkan mutu pelayanan publik melalui penerapan E-Government.

Program ini terus digencarkan oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009.⁷ tentang bahwa negara yang berkewajiban memenuhi kebutuhan serta hak dasar setiap warga negara. Direktorat jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menargetkan aktivasi IKD sebesar 25% dari total

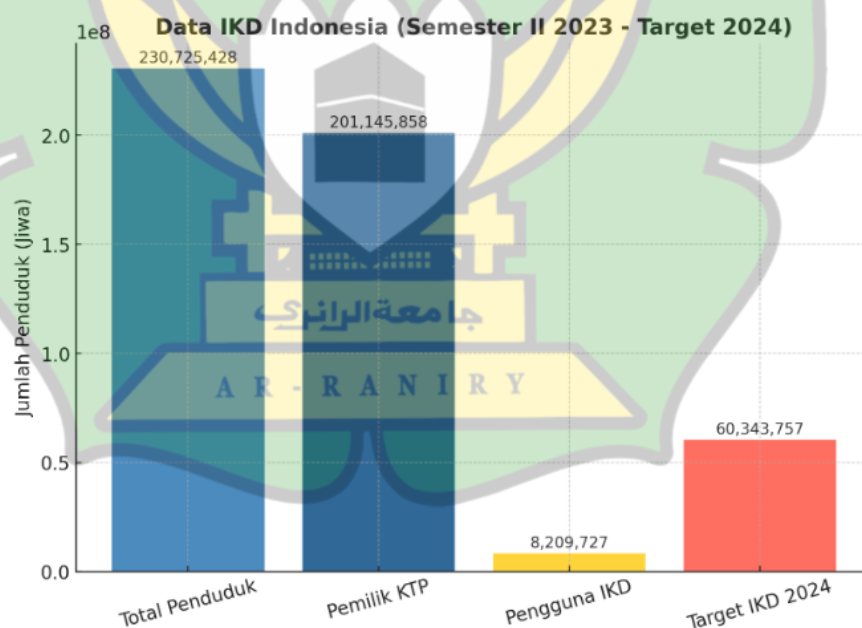
⁵Oktaviani, D. & Rahardjo, B. (2022). "Peran Literasi Digital dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap Layanan Publik Digital." *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 55–66.

⁶Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). *Indeks Literasi Digital Indonesia 2021*. Jakarta: Kominfo RI.

⁷Helga Margareth, "UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik," *Ekonomi Regional* 2017, 32.

wajib E-KTP pada tahun 2023, tetapi hanya tercapai sekitar 3,3%. Capaian aktivasi IKD masih jauh dari target yang diharapkan. Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan digitalisasi dalam administrasi kependudukan melalui IKD.

Direktorat jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menegaskan bahwa penerapan IKD sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta keputusan Presiden Nomor 82 tahun 2023 mengenai transformasi digital Indonesia dan integrasi layanan nasional. Program IKD pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019 dan kini semakin digencarkan sesuai instruksi presiden untuk mempercepat aktivasi IKD di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Penduduk, Pemilik KTP, Pengguna IKD, dan Target IKD Tahun 2024

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Keamanan serta kenyamanan pengguna dalam aplikasi IKD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Langkah ini dilakukan agar sistem IKD sesuai dengan standar keamanan internasional serta mudah digunakan oleh masyarakat. Saat ini, 6.444 lembaga pemerintah dan swasta telah bekerja sama dengan Dukcapil untuk menggunakan IKD sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan IKD, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih efisien dan modern.

Pengembangan aplikasi IKD sudah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan digitalisasi ini diharapkan akses data kependudukan dapat terintegrasi dengan kepentingan berbagai bidang pendidikan, perawatan kesehatan, pariwisata, transportasi, dan logistik. ini sangatlah memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh dunia.⁸ Dengan adanya fitur-fitur ini, IKD tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi, tetapi juga mencerminkan era satu data nasional yang sesungguhnya. Dimana seluruh informasi kependudukan yang valid dan terintegrasi dapat diakses secara terintegrasi dalam satu platform.

Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pidie sebagai lembaga yang bertanggung jawab khusus di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri khususnya

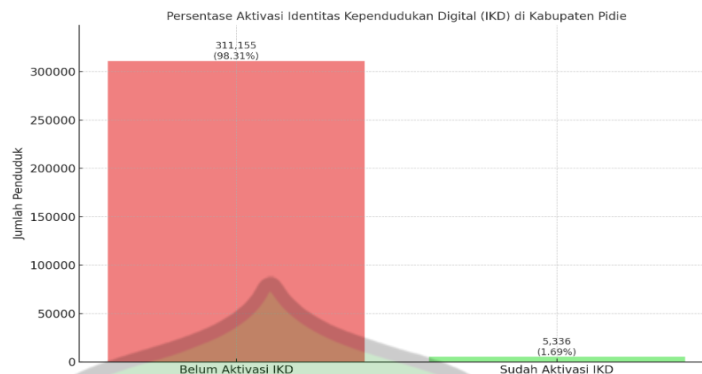
⁸Apriliani, D., Rahman, B., & Ibrahim, D. (2021). Digitalisasi Pelayanan Publik (Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android Di Kabupaten Bangka) 2021

direktorat jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan kebijakan nasional di bidang kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie telah menginisiasi KTP digital sebagai langkah menuju transformasi digital dalam layanan administrasi juga bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi warga. Data pribadi warga harus dilindungi karena hak privasi setiap orang.⁹ memastikan bahwa data tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masyarakat sering mempertanyakan keamanan data pada aplikasi IKD khususnya terkait potensi penyalahgunaan informasi pribadi. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah melengkapi IKD dengan sejumlah fitur keamanan. Di antaranya adalah pencegahan tangkapan layar (*screenshot*) pada tampilan identitas, penerapan sistem otentikasi berbasis kata sandi, serta penggunaan kode QR yang bersifat dinamis dan hanya berlaku dalam waktu singkat sekitar 90 detik.¹⁰ Langkah-langkah ini dirancang untuk meminimalkan risiko akses tidak sah, mencegah penyebaran data yang tidak diinginkan, dan memastikan perlindungan informasi pribadi pengguna.

⁹Achmad Ariansyah and Uce Indahyanti, “Fitur Ekstraksi Pada Pemodelan Topik Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation Pada Peristiwa Kebocoran Data,” no. 2 (2024): 1–24.

¹⁰ Erikson P. Manihuruk.” Kompasiana, 12 Februari 2023, <https://www.kompasiana.com/agussis/63e8f4addee15f9470ab2/-cara-membuat-ktp-digital>.



Gambar 2.1 Laporan Layanan Dinas Dukcapil Kabupaten Pidie

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan, jumlah penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2024 adalah 451.076 jiwa, dengan 316.491 jiwa yang masuk dalam kategori wajib KTP. Namun, jumlah pengguna IKD hanya 5.336 jiwa, atau sekitar 1,69% dari total wajib KTP. Angka ini menunjukkan bahwa pengguna IKD masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya dapat mengakses layanan ini. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat dua persoalan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program IKD di Kabupaten Pidie. Pertama, strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendorong penggunaan IKD belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya yang dilakukan seperti sosialisasi dan pelayanan jemput bola memang telah dilaksanakan, namun jangkauannya masih terbatas pada kelompok atau wilayah tertentu sehingga belum mampu memberikan pemerataan informasi di seluruh kecamatan dan desa. Hal ini tercermin dari capaian aktivasi IKD yang masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP di daerah tersebut. Kedua, rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap

manfaat serta fungsi IKD membuat sebagian besar warga belum merasa urgensi untuk melakukan aktivasi. Banyak masyarakat yang menganggap IKD belum memiliki perbedaan signifikan dengan KTP-el fisik atau bahkan belum memahami kemudahan dan keamanan yang ditawarkan. Kedua permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi pencapaian target nasional IKD, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi dan edukasi publik yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada analisis strategi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat efektivitas program IKD di Kabupaten Pidie.



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendorong penggunaan IKD belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan fungsi IKD, sehingga masyarakat belum merasa perlu untuk mengaktifkannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat di rumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apa saja hambatan yang menyebabkan rendahnya tingkat penggunaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten pidie?
2. Bagaimana strategi yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dalam meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang menyebabkan rendahnya tingkat penggunaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten pidie.

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dalam meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya dalam kajian manajemen strategis di sektor pelayanan publik yang berbasis digital.

Secara Praktis, Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama yang berkaitan dengan program identitas kependudukan digital dalam pelayanan publik.